



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUPRPTI, SH**
Jabatan : Perencana Ahli Muda
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **JUVINAL DA CRUZ SOARES, S.Sos**
Jabatan : Sekretaris DINSOSDALDUKKBP3A
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Sekretaris DINSOSDALDUKKBP3A

JUVINAL DA CRUZ SOARES, S.Sos
NIP. 19730309 199510 1 001

Pihak Pertama
Perencana Muda

SUPRPTI, SH
NIP. 19750227 199603 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PERENCANA AHLI MUDA
PADA
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURBALINGGA

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan dan Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	Persen	100
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.904.000	APBD
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 3.320.000	APBD
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.584.000	APBD

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
 Sekretaris DINSOSDALDUKKBP3A



JUVINAL DA CRUZ SOARES, S.Sos
 NIP. 19730309 199510 1 001

Pihak Pertama
 Perencana Muda



SUPRAPTI, SH
 NIP. 19750227 199603 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IKSAN WARSONO, S.SOS**
Jabatan : Plt. ANALIS KEBIJAKAN MUDA
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **RATNAWATI DEWI, S.E, M.S.E**
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Plt. Kabid Pemberdayaan Sosial

RATNAWATI DEWI, S.E, M.S.E
NIP. 19780801 200604 2 001

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Muda

IKSAN WARSONO, S.SOS
NIP. 19650626 198903 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
PURBALINGGA : SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN POTENSI SOSIAL/
ANALIS KEBIJAKAN MUDA

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Cakupan PSKS yang di bina	%	65.48
1	Meningkatnya kapasitas Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	496
2	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	2
3	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	1

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten Kota	Rp. 1.140.851.000	APBD
1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 744.820.000	APBD
1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten Kota	Rp. 393.185.000	APBD
1.3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp. 2.846.000	APBD

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Plt. Kabid Pemberdayaan Sosial

RATNAWATI DEWL, S.E, M.S.E
NIP. 19780801 200604 2 001

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Muda

IKSAN WARSONO, S.SOS
NIP. 19650626 198903 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IKSAN WARSONO, S.SOS**
Jabatan : **Plt. ANALIS KEBIJAKAN MUDA**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **RATNAWATI DEWI, S.E, M.S.E**
Jabatan : **Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Plt. Kabid Pemberdayaan Sosial

RATNAWATI DEWI, S.E, M.S.E
NIP. 19780801 200604 2 001

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Muda

IKSAN WARSONO, S.SOS
NIP. 19650626 198903 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
PURBALINGGA : SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN POTENSI SOSIAL/
ANALIS KEBIJAKAN MUDA

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya pemutakhiran data fakir miskin daerah di seluruh desa/kelurahan	Persentase desa/kel yang aktif melakukan pemutakhiran data fakir miskin	Persen	100
	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	136.700
2	Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang terpelihara	Persen	85
	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	5

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Rp. 140.496.000	APBD
1.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 140.496.000	APBD
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Kota	Rp. 33.044.000	APBD
2.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Kabupaten kota	Rp. 10.000.000	APBD
2.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota	Rp. 23.044.000	APBD

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Plt. Kabid Pemberdayaan Sosial

RATNAWATI DEWL, S.E, M.S.E
NIP. 19780801 200604 2 001

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Muda

IKSAN WARSONO, S.SOS
NIP. 19650626 198903 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DRA.TUTI HIDAYATI
Jabatan : Plt.ANALIS KEBIJAKAN MUDA
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **BRIANDA ASTRO DIAZ,S.STP,M.SI**
Jabatan :KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Kabid P3A DINSOSDALDUK KBP3A

BRIANDA ASTRO DIAZ,S.STP,M.SI
NIP. 19871023 200602 2 001

Pihak Pertama
Plt.Analis Kebijakan Muda

DRA. TUTI HIDAYATI
NIP. 19680318 1994012002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
PURBALINGGA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Persentase profil gender dan anak yang tersedia	Persen	100
	Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	dokumen	1
2	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Pelembagaan PHA yang difasilitasi	Lembaga	2
	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	1
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	3
3	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang berkembang	Lembaga	2
	penguatan kerjasama antar	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan	dokumen	3

	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	lembaga	1
4	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	Tingkat penurunan kekerasan terhadap anak	Kasus	220
	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	dokumen	2
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota	kegiatan	12
	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Orang	30

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengumpulan, Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 2.658.000	APBD
1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 2.658.000	APBD
2	Pelebagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah dan Dunia	Rp. 11.399.000	APBD

2.1	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 5.789.000	APBD
2.2	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 5.610.000	APBD
3	Penguatan dan Pengembangan Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 8.292.000	APBD
3.1	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 4.045.000	APBD
3.2	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 4.247.000	APBD
4.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Rp.161.222.000	APBD/DAK
4.1	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Rp. 2.050.000	APBD
4.2	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 152.031.000	APBD/DAK
4.3	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 7.141.000	APBD

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Kabid P3A DINSOSDALDUK KBP3A



BRIANDA ASTRO DIAZ, S.STP, M.SI
NIP. 19871023 200602 2 001

Pihak Pertama
Plt. Analis Kebijakan Muda



DRA. TUTI HIDAYATI
NIP. 19680318 1994012002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DRA. TUTI HIDAYATI**
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN MUDA
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **BRIANDA ASTRO DIAZ,S.STP.,M.SI**
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Kabid P3A DINSOSDALDUK KBP3A

BRIANDA ASTRO DIAZ,S.STP.,M.SI
NIP. 19871023 200602 2 001

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Muda

DRA. TUTI HIDAYATI
NIP. 19680318 1994012002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
PURBALINGGA

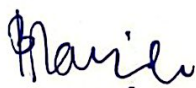
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya pembangunan responsif gender	Persentase kelembagaan PUG yang aktif di OPD	Persen	100
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	6
2	Meningkatnya kapasitas perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Persentase perempuan yang berperan dalam pembangunan	Persen	3.66
	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4
	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	2

3	Terlaksananya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Persentase layanan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	Persen	100
	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga	3
4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang aktif	Persen	100
	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	lembaga	3
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	orang	4
	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	dokumen	1

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Target
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 18.042.000	APBD
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 18.042.000	APBD
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.264.588.000	APBD
2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp. 6.727.000	APBD
2.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, sosial dan Ekonomi	Rp. 257.861.000	APBD
3	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 19.396.000	APBD/DAK
3.1	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 12.196.000	APBD
3.2	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 7.200.000	APBD
4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.150.200.000	APBD
4.1	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 5.890.000	APBD
4.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 69.360.000	APBD
4.3	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 75.000.000	APBD

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Kabid P3A DINSOSDALDUK KBP3A



BRIANDA ASTRO DIAZ, S.STP, M.SI
NIP. 19871023 200602 2 001

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Muda



DRA. TUTI HIDAYATI
NIP. 19680318 1994012002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUHARSONO, SH**
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN MUDA
Selanjutnya disebut pihak pertama.

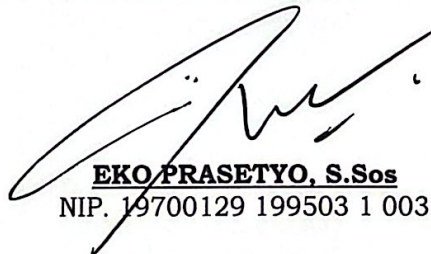
Nama : **EKO PRASETYO, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Kabid Asistensi dan Rehabilitasi Sosial



EKO PRASETYO, S.Sos
NIP. 19700129 199503 1 003

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Muda



SUHARSONO, SH
NIP. 197011021992031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
PURBALINGGA : SUB KOORNIATOR REHABILITASI SOSIAL/ANALIS
KEBIJAKAN MUDA

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	Persentase layanan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang disediakan	Persen	100
	Tersedianya Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	30 Orang
	Tersedianya Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20 orang
	Terselenggaranya Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	3 orang
	Terselenggaranya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	1606 orang
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	250 orang
	Terlaksananya Pemberian Layanan Data	Jumlah PSK yang mendapatkan layanan	orang	3 orang

	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PSK yang mendapatkan layanan kedaruratan	orang	3 orang
	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PSK yang mendapat layanan penelusuran keluarga	orang	3 orang
	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PSK yang mendapatkan layanan rujukan	orang	3 orang


No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terntar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Rp. 6.047.791.000	APBD
1.1	Penyediaan Sandang	Rp. 7.178.000	APBD
1.2	Penyediaan Alat Bantu	Rp. 60.950.000	APBD
1.3	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp. 2.660.000	APBD
1.4	Pemberian Bimbingan, Fisik, Mental Spiritual dan Sosial	Rp. 5.889.050.000	APBD
1.5	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp. 79.953.000	APBD
1.6	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp. 2.000.000	APBD
1.7	Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp. 2.000.000	APBD
1.8	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp. 2.000.000	APBD
1.9	Pemberian Layanan Rujukan	Rp. 2.000.000	APBD

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Kabid Asistensi dan Rehabilitasi Sosial


EKO PRASETYO, S.Sos
NIP. 19700129 199503 1 003

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Muda


SUHARSONO, SH
NIP. 197011021992031005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUHARSONO, SH**
Jabatan : **Plt.ANALIS KEBIJAKAN MUDA**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **EKO PRASETYO, S.Sos**
Jabatan : **Kepala Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial**

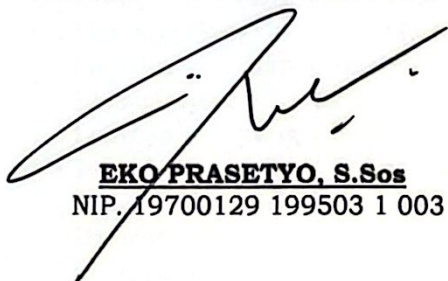
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Kabid Asistensi dan Rehabilitasi Sosial



EKO PRASETYO, S.Sos
NIP. 19700129 199503 1 003

Pihak Pertama
Plt.Analis Kebijakan Muda



SUHARSONO, SH
NIP. 197011021992031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
PURBALINGGA : SUB KOORNIATOR REHABILITASI SOSIAL/ANALIS
KEBIJAKAN MUDA

No.	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya pemutakhiran data fakir miskin daerah di seluruh desa/kelurahan	Persentase desa/kel yang aktif melakukan pemutakhiran data fakir miskin	Peren	100
	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	1806 orang
2	Terlaksananya penanganan bagi korban bencana alam dan sosial	Persentase layanan dasar yang disediakan bagi korban bencana alam dan sosial	Persen	100
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	250 orang
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	55

	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100
	Terlaksananya peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana	Persentase Taruna Siaga Bencana yang meningkat kapasitasnya	Persen	100
	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	37

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Rp. 1.198.161.000	APBD
1.1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp. 1.057.665.000	APBD
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kabupaten Kota	Rp. 137.011.000	APBD
2.1	Penyediaan Permakanan	Rp. 99.597.000	APBD
2.2	Penyediaan Sandang	Rp. 10.062.000	APBD
2.3	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Rp. 27.352.000	APBD
3	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kota	Rp. 13.161.000	APBD
3.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp. 13.161.000	APBD

Purbalingga, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Kabid Asistensi dan Rehabilitasi Sosial



EKO PRASETYO, S.Sos
NIP. 19700129 199503 1 003

Pihak Pertama
Plt. Analis Kebijakan Muda



SUHARSONO, SH
NIP. 197011021992031005